

BAB IV

KESIMPULAN

MPK merupakan kumpulan puisi epik karya F.Rahardi yang mengisahkan para kampret yang harus tergesur dari gua kapur dan terus bermigrasi untuk menghindari keserakahan manusia. Berdasarkan analisis dapat diberikan kesimpulan secara menyeluruh. Secara struktural, kumpulan puisi epik MPK meliputi diksi, bahasa figuratif, tipografi, tema, tokoh, latar, dan alur.

Diksi yang dipilih adalah kata-kata sederhana yang biasa terdapat dalam kehidupan sehari-hari bukan kata-kata yang padat dan klise, dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami makna MPK. Demikian halnya dengan bahasa figuratif, kosakata bahasa figuratif mengambil sesuatu hal yang dekat dengan masyarakat. Secara tipografi, F.Rahardi dalam menampilkan puisi-puisinya seringkali berdasar pada judulnya.

Dalam MPK menampilkan para kampret (kelompok masyarakat yang terpinggirkan). Kampret sebagai tokoh utama ditampilkan dengan beberapa karakter, yakni naif, optimis, dan pesimis. Dalam memperkonkret dan memberi kesan realistis pada pembaca, MPK mengambil latar berdasarkan peristiwa yang dialami para kampret, antara



lain; gua kapur, gedung MPR/DPR, kantor LBH, lapangan golf, hutan Sumatera, gereja di bilangan polonia. Latar berdasarkan waktu lebih dominan mengambil waktu malam hari karena aktivitas kampret adalah malam hari. Alur MPK menggunakan alur maju, mulai dari permulaan bukit kapur mulai dibongkar hingga para kampret harus selalu bermigrasi untuk tetap eksis di dunia ini.

Analisis viktimologi dalam MPK adalah mengupas permasalahan para kampret sebagai korban yang harus tergesur dari tempat hidupnya demi sebuah pembangunan yang dilakukan oleh manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Pembangunan yang disoroti dalam MPK adalah pembangunan era orde baru.

Pembangunan yang ada boleh dikatakan sebagai produk kejahatan korporasi dari pemerintah orde baru, yang menfokuskan pembangunan pada peningkatan ekonomi bukan pembangunan yang berwawasan lingkungan akibatnya ekologi terganggu. Termasuk habitat para kampret yakni gua kapur sebagai pemasok bahan baku industri semen.

Walaupun demikian pemerintah juga berupaya untuk mengatasi permasalahan mengenai lingkungan hidup dengan mengeluarkan hukum tentang Lingkungan Hidup. Namun hukum ini belum juga sepenuhnya mampu mengimbangi lajunya pertumbuhan pembangunan yang masih menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Penegakan hukum lingkungan masih mengalami hambatan. Antara lain sosialisasi

peraturan perundangan tidak memadai, aparat penegakan hukum kurang memahami perkembangan hukum lingkungan dan kekurangan undang-undang itu sendiri.

Dari sisi lain areal pembangunan menjadi lebih berharga daripada areal yang belum tersentuh pembangunan. Dalam hal ini pembangunan dinilai berhasil. Tetapi hal yang perlu ditekankan adalah pembangunan yang ideal adalah pembangunan yang berwawasan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA